p-ISSN 2622-3082
e-ISSN 2622-3090

AKUNTANSI DALAM SEHELAI KAIN: NILAI TRADISI MATA UANG KAMPUA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT BUTON

Muntu Abdullah[1], Fitriaman[2], Wa Ode Endiaverni[3*]
[1,2] Akuntansi, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
[3] Akuntansi, Institut Dharma Bharata Grup, Kendari, Indonesia
*Penulis Korespodensi: endiaverni24@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to construct Nusantara cultural values to redefine accounting within a broader perspective, focusing on the exploration of the tradition of Kampua currency production during the Buton Sultanate. The study employs a qualitative approach grounded in the Nusantara paradigm, which emphasizes an integral view of reality while unifying religiosity and culture. Data were collected through semi-structured in-depth interviews with seven key informants and documentation studies. To ensure data quality and avoid bias, the collected data underwent a data reduction process beforehand, prior to being systematically analyzed to generate meaningful insights. The findings indicate that accounting is not merely a mechanistic technical procedure, but a social reality that lives and grows within inter-individual interactions. Kampua, a currency made of woven cloth, served as an economic transaction instrument whose management was strictly supervised by the sultanate authority. Its production process, exclusively performed by specialized weavers, represents the construction of noble cultural values within Buton society, encompassing honesty, trustworthiness, responsibility, mutual cooperation (gotong royong), and spiritual belief as a form of devotion to God. This study provides a theoretical contribution by demonstrating that accounting practices and internal control mechanisms can be deeply derived from local wisdom. These findings clarify that accounting, as reflected through the use of Kampua currency and the strict internal control system over its circulation, is a cultural product that positions spiritual and moral values as the primary foundation within traditional economic accountability systems.
Keywords: Kampua Currency; Cultural Accounting; Buton Society; Local Wisdom.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi nilai-nilai budaya Nusantara dalam upaya memaknai akuntansi melalui perspektif yang lebih luas, dengan berfokus pada eksplorasi tradisi pembuatan mata uang Kampua di masa Kesultanan Buton. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berlandaskan paradigma Nusantara yang mengedepankan pandangan integral atas realitas serta menyatukan religiositas dan kebudayaan. Data dihimpun melalui wawancara mendalam semi terstruktur dengan tujuh informan kunci serta studi dokumentasi. Guna menjamin kualitas data dan menghindari bias, data yang terkumpul melalui proses reduksi data terlebih dahulu sebelum dianalisis secara sistematis guna menghasilkan informasi yang bermakna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi bukan sekadar prosedur teknis mekanistis, melainkan sebuah realitas sosial yang hidup dan tumbuh dalam interaksi antarindividu. Mata uang Kampua, yang berbahan dasar kain tenun, berfungsi sebagai instrumen transaksi ekonomi yang pengelolaannya diawasi secara ketat oleh pihak kesultanan. Proses produksinya, yang hanya boleh dilakukan penenun khusus, merepresentasikan konstruksi nilai budaya luhur masyarakat Buton yang mencakup nilai kejujuran, kepercayaan dan tanggungjawab, nilai gotong royong, serta keyakinan spiritual sebagai manifestasi pengabdian kepada Tuhan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menunjukkan bahwa praktik akuntansi dan mekanisme pengendalian internal dapat digali secara mendalam dari kearifan lokal. Temuan ini menegaskan bahwa akuntansi, yang direfleksikan melalui penggunaan mata uang Kampua serta ketatnya sistem pengendalian internal atas peredarannya, merupakan produk budaya yang menempatkan tatanan nilai spiritual dan moral sebagai fondasi utama dalam sistem pertanggungjawaban ekonomi tradisional.
Kata Kunci: Mata Uang Kampua; Akuntansi Budaya; Masyarakat Buton; Kearifan Lokal.

Jurnal Akun Nabelo:
Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objekif
Volume 9/Nomor 1/Juli 2026
doi:10.11594/untad.jan.9.1.26771
Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako

A. PENDAHULUAN

Akuntansi sering kali terjebak dalam reduksi makna sebagai disiplin ilmu yang murni teknis, mekanis, dan bebas nilai. Dalam perspektif modern, akuntansi dipandang hanya sebagai instrumen pencatatan transaksi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan entitas bisnis dan pemilik (Riduwan, 2007) (Endiaverni et al., 2024). Seiring dengan akselerasi peradaban manusia dan kemajuan industri global, fungsi uang sebagai standar pertukaran barang dan jasa telah mengalami pergeseran paradigma yang ekstrem. Uang tidak sekadar menjadi alat tukar, melainkan telah menjelma menjadi komoditas yang diperdagangkan demi keuntungan finansial semata. Fenomena ini memicu ketidakadilan sistemik dalam roda perekonomian dunia, di mana nilai nominal sering kali mengabaikan aspek moralitas dan kesejahteraan sosial.

Refleksi kritis terhadap akuntansi arus utama yang sangat positivistik menuntut sebuah konstruksi makna baru. Akuntansi sejatinya tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang ada dalam suatu organisasi. Interaksi sosial, sistem, dan prosedur pada akhirnya akan melahirkan nilai-nilai budaya yang membentuk identitas sebuah komunitas (Kamayanti, 2016) (Aneswari, Y., dan Musmini, 2017). Di tengah hegemoni pemikiran akuntansi Barat, Nusantara memiliki sejarah panjang mengenai tata kelola moneter yang sarat akan nilai luhur, salah satunya tercermin dalam peradaban Kerajaan Buton yang kemudian menjadi Kesultanan Buton. Jauh sebelum masa kemerdekaan, Kesultanan Buton telah memiliki kedaulatan ekonomi melalui penggunaan "Kampua" sebagai mata uang resmi dan alat pembayaran yang sah. Kampua pertama kali diperkenalkan pada masa Ratu Bulawambona sekitar abad ke-14, dan penggunaannya merujuk pada tata kelola sejak masa Ratu Wa Kaa Kha. Terbuat dari secarik kain tenun yang disebut *bhida*, pembuatan Kampua dilakukan secara khusus dan di bawah pengawasan ketat pemerintah kesultanan (Munafi, 2022) (Ahmad, 2022).

Gambar 1. Mata Uang Kampua



Sumber: *Museum Bank Indonesia, Jakarta*

Kehadiran Kampua bukan sekadar sebagai alat tukar, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keseragaman sistem pembayaran dan pengeluaran kerajaan (Susantio, 2010). Mekanisme produksi yang selektif dengan pengawasan langsung oleh Bhonto Ogena (Menteri Besar), menjadi bentuk awal dari sistem pengendalian internal (*internal control*) yang sangat canggih pada zaman tersebut guna meminimalisasi risiko pemalsuan. Ukuran Kampua disesuaikan dengan jengkal tangan pejabat kesultanan yang berwenang, sehingga motif dan standarnya selalu mengalami penyesuaian (Lestari, 2017). Akuntansi dalam konteks ini tidak lagi dipandang sebagai sekadar alat pencatatan angka, melainkan sebuah instrumen kultural yang inheren. Menurut Rosdin (2015: 154) praktik tradisi Buton mengintegrasikan aspek kepercayaan, akuntabilitas, dan loyalitas kepada pimpinan atau sultan (*opu*) sebagai manifestasi ketaatan kepada Tuhan (*waopu*).

Meskipun literatur terdahulu telah mulai mengeksplorasi praktik akuntansi budaya, seperti pada tatanan masyarakat Melayu (Asiam, 2024), penetapan nilai mahar pernikahan adat Buton (Rachmadani et al., 2024), hingga formulasi etika akuntan berbasis *bhinci-bhinciki kuli* (Endiaverni et al., 2023). Sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada ranah interaksi sosial-kemasyarakatan dan etika individu. Belum ada studi yang secara spesifik membedah eksistensi instrumen fisik masa lampau, seperti mata uang Kampua, sebagai wujud nyata dari sistem tata kelola moneter dan pengendalian internal (*internal control*) yang mapan. Zahari (1997: 40) menerangkan bahwa mata uang kampua terdiri dari pecahan *bhoka*, *suku*, *sen* dan *uuva*. Masing-masing pecahan tersebut memiliki padanan nilai yang eksak ketika ditransfer nilainya ke mata uang Gulden Belanda, di mana 1 Bhoka bernilai 120 sen, 1 Suku bernilai 30 sen, 1 Sen bernilai 10 sen, dan 1 Uwva bernilai 5 sen Gulden. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan literatur tersebut.

Urgensi penelitian ini mengkonstruksi sistem akuntansi masa lampau, di mana Kampua tidak sekadar berfungsi sebagai alat tukar material, melainkan instrumen tata kelola yang syarat akan nilai moralitas publik dan akuntabilitas spiritual kepada penguasa dan Tuhan. Penelusuran kembali kearifan lokal bukan sekadar pelestarian sejarah, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial bagi profesi akuntansi untuk menemukan alternatif sistem yang lebih beretika (Endiaverni et al., 2023). Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya menemukan kembali "ruh" akuntansi tradisional masa lampau menggunakan Paradigma Nusantara. Paradigma ini merupakan sudut pandang holistik yang menempatkan praktik akuntansi tidak hanya sebagai alat pencatatan angka dan maksimalisasi profitabilitas ekonomi, melainkan sebagai sebuah kesatuan yang utuh dengan nilai-nilai moral, sosial, dan teologis masyarakat lokal. Melalui paradigma ini, pengelolaan mata uang Kampua diposisikan sebagai manifestasi dari sebuah simfoni nilai di mana mengejar profitabilitas atau keberlanjutan ekonomi berjalan selaras dan harmonis dengan batasan moralitas serta norma adat yang berlaku (Karyada, 2024) (Mulawarman, 2021).

Keunikan dari penelitian ini terletak pada paradoks materialitas Kampua itu sendiri. Di tengah peradaban global masa lampau yang mengandalkan logam mulia sebagai standar nilai intrinsik, Kesultanan Buton menjaga stabilitas ekonominya hanya dengan sehelai kain tenun. Indikasi lapangan menunjukkan bahwa Kampua tidak hanya digunakan sebagai medium pertukaran komoditas, melainkan bertransformasi menjadi instrumen manajerial dalam mengendalikan sumber pendapatan kesultanan, seperti penarikan pajak (*weti*), penentuan mahar (*popolo*), dan pemberian penghargaan adat (*pasali*). Sistem moneter kain ini pada masanya memiliki ketahanan dari pemalsuan yang didukung oleh dokumentasi sejarah mengenai kontrol ketat motif tenunan dan petak benang khusus oleh otoritas kesultanan. Risiko inflasi juga diredam melalui regulasi pembatasan masa edar maksimal empat tahun sebelum uang ditarik kembali. Meskipun sistem tradisional ini punah pada tahun 1960-an, keberlanjutan di masa lalu membuktikan adanya fondasi kuat berupa empat nilai utama, yaitu nilai kejujuran, nilai kepercayaan, nilai tanggung jawab, dan nilai keyakinan spiritual.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan keilmuan akuntansi bahwa praktik tata kelola keuangan dapat digali secara mendalam dari kearifan lokal. Secara praktis, implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam melestarikan tradisi budaya Kesultanan Buton, serta memberikan wacana bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi transaksi yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal. Untuk memberikan gambaran yang sistematis, penulisan artikel ini disusun ke dalam lima bagian utama. Bagian

pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan, dan tujuan penelitian. Bagian kedua memaparkan tinjauan pustaka sebagai landasan teoretis. Bagian ketiga menguraikan metode penelitian kualitatif yang diterapkan. Bagian keempat menyajikan hasil eksplorasi lapangan beserta pembahasannya secara mendalam. Terakhir, bagian kelima menutup artikel dengan kesimpulan dan rekomendasi saran.

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1. Evolusi Uang dalam Perspektif Ekonomi dan Paradigma Nusantara

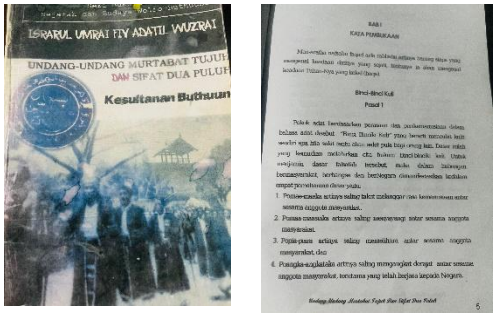
Sejarah perkembangan uang bermula dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang pada tahap peradaban awal direpresentasikan melalui aktivitas berburu untuk bertahan hidup (Harari, 2021). Seiring peralihan menuju masyarakat agraris, sistem pertukaran berevolusi menjadi barter. Namun, sistem ini memiliki kelemahan inheren, seperti keterbatasan skala perdagangan, lambatnya proses akibat perlunya *double coincidence of wants*, serta ketiadaan alat ukur nilai yang standar (Lestari dan Sugiyanto, 2017). Kesulitan fungsional ini memicu lahirnya mata uang formal, yang secara historis tercatat pertama kali digunakan oleh Raja Alyattis dari Lydia, yang sekarang berlokasi di bagian Turki, pada tahun 600 SM (Safitri et al., 2024) (Housel, 2022).

Dalam literatur ekonomi klasik, Adam Smith (1759) dalam The Theory of Moral Sentiments menangkap bahwa eksistensi uang sejak awal tidak terlepas dari nilai-nilai moral dalam masyarakat, yang kemudian dilekatkan pada barang dan jasa untuk membentuk harga (Smith, 2017). Secara konvensional, uang memang berfungsi mekanis sebagai media pemfasilitasi transaksi dan penyimpan kekayaan untuk menggerakkan roda perekonomian. Namun, melalui Paradigma Nusantara, pemaknaan uang dituntut untuk melampaui fungsi materialistis tersebut. Paradigma ini memandang realitas ekonomi secara integral, yakni instrumen moneter tidak hanya hadir sebagai alat tukar yang bebas nilai, melainkan sebagai wujud manifestasi interaksi sosial, religiositas, dan tatanan moral sebuah peradaban (Mulawarman, 2021).

B.2. Konstruksi Akuntansi Budaya sebagai Realitas Sosial

Secara etimologis, budaya berakar dari bahasa Sanskerta yakni "buddayah" (bentuk jamak dari budhi), yang bermakna akal atau budi. Konsep ini mencakup seluruh ekspresi akal budi dan sikap mental manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks tradisi Kesultanan Buton, penciptaan mata uang Kampua bukanlah dilatari murni oleh motif ekonomi kapitalis, melainkan lahir sebagai pengejawantahan dari nilai ketaatan, amanah, kejujuran, dan semangat saling memelihara berlandaskah falsafah hidup masyarakat Buton, yakni *bhinci-bhinciki kuli* (tertuang dalam Bab I Undang-Undang Murtabat Tujuh Kesultanan Buton) (Endiaverni et al., 2024). Kampua menjelma sebagai simbol tata laku mental leluhur Buton dalam membangun tatanan masyarakat yang berintegritas. Hal ini menguatkan Paradigma Nusantara bahwa akuntansi adalah sebuah realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat, bukan prosedur teknis yang kaku. Terdapat korelasi paradigmatik yang kuat bahwa tata nilai luhur suatu bangsa mengonstruksi praktik tata kelolanya, yang pada akhirnya menjadikan akuntansi sebagai produk budaya sejati (Mulawarman, 2021). Oleh karena itu, kerangka epistemologi akuntansi harus dikembangkan sesuai dengan akar kultural di mana sistem tersebut diterapkan, sebab sebuah praktik akuntansi yang dipandang efektif di suatu negara belum tentu relevan atau etis bagi bangsa lain apabila abai terhadap kearifan lokalnya.

Gambar 2. BAB I Pasal 1 Undang-Undang Murtabat Tujuh Kesultanan Buton



Sumber: *Undang-Undang Murtabat Tujuh dan Sifat Dua Puluh*

B.3. Interseksi Budaya dan Perilaku Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan moneter sangat bergantung pada akumulasi pengalaman dan tata nilai yang membentuk respons perilaku seseorang terhadap sumber daya ekonomi. Literatur keuangan keperilakuan mencatat bahwa kesalahan fatal dalam mengelola keuangan kerap kali terjadi bukan karena rendahnya kecerdasan akademik formal, melainkan karena rapuhnya sikap moral dan soft skill (Housel, 2022). Perilaku manusia sejatinya merupakan artikulasi dari dialektika dalam benaknya, yang sering kali lebih dikendalikan oleh sentimen perasaan sesaat dibandingkan rasionalitas logis.

Ketidakmampuan dalam mengelola keuangan juga diwariskan antargenerasi, mengendap menjadi habituasi negatif, dan membentuk budaya yang menghambat pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi. Di sinilah Paradigma Nusantara mengantitesis bahwa tata nilai budaya yang luhur mampu memitigasi anomali perilaku tersebut. Pengetahuan dan budaya kolektif terbukti saling berkorelasi erat dengan perilaku individu (Alifuddin & Widodo, 2022) dan secara empiris memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja tata kelola keuangan (Pradiningtyas & Lukiastuti, 2019) (Sari, 2018). Melalui internalisasi budaya, pengelolaan uang bertransformasi dari sekadar rutinitas pragmatis menjadi praktik akuntabilitas yang mengedepankan tanggung jawab komunal dan spiritual.

C. METODE PENELITIAN

C.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan budaya secara mendalam. Berbeda dengan riset akuntansi arus utama yang kerap berakar pada paradigma positivisme, penelitian ini secara spesifik mengadopsi paradigma Nusantara sebagai kerangka berpikir. Pemilihan paradigma Nusantara didasari oleh karakteristiknya yang sangat relevan dengan objek penelitian, yakni (1) jati diri kenusantaraan (dimana bumi berpijak, disitu langit dijunjung), (2) pandangan integral atas realitas, (3) menyelaraskan aspek religiositas dengan kebudayaan, dalam (4) upaya mencari kebenaran sejati yang bersumber dari Tuhan. Melalui lensa paradigma Nusantara ini, mata uang Kampua tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen ekonomi yang statis, melainkan dimaknai sebagai simbol tradisi yang sarat akan nilai-nilai luhur. Setiap tahapan proses pengerjaan Kampua diyakini sebagai bentuk penghambaan diri kepada pemimpin yang memanifestasikan ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Untuk menunjang desain penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode guna menjamin perolehan informasi yang komprehensif dan multidimensi, yaitu wawancara mendalam semi terstruktur, studi pustaka, serta studi dokumentasi melalui

pengumpulan arsip historis dan bukti visual autentik mata uang Kampua (yang disajikan pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3).

Pertama, penelitian ini menerapkan teknik wawancara mendalam dengan pendekatan tidak terstruktur karena melalui metode ini, peneliti membangun dialog interaktif yang bersifat bersahabat dan fleksibel, tanpa terikat secara kaku pada pedoman formal, sehingga mampu beradaptasi dengan situasi serta kondisi psikologis informan. Fokus utama dari interaksi lisan ini adalah untuk membedah lebih dalam mengenai nilai-nilai tradisi, kompleksitas proses pembuatan, hingga fungsi strategis transaksi mata uang Kampua dalam struktur sosial masyarakat. Kedua, sebagai instrumen validasi, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk mendukung data hasil wawancara melalui penghimpunan sumber-sumber tertulis dan arsip sejarah otentik Kesultanan Buton. Selain teks, teknik ini juga mencakup pengumpulan bukti visual berupa foto fisik peninggalan mata uang Kampua guna memperkuat fakta-fakta historis yang ditemukan. Ketiga, penelitian ini diperkuat dengan studi pustaka yang mencakup penelusuran terhadap dokumen sejarah tertulis, historiografi, serta literatur akademik terdahulu. Sinergi antara studi pustaka dan data lapangan ini berperan krusial dalam meningkatkan kredibilitas temuan kualitatif serta memastikan validitas interpretasi terhadap realitas akuntansi yang dikaji.

C.2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah eks-Kesultanan Buton (kini berada di wilayah administratif Kota Baubau, Sulawesi Tenggara) yang menjadi pusat historis peredaran dan kebudayaan mata uang Kampua. Sumber data utama dalam penelitian ini bertumpu pada data primer yang dihimpun secara langsung dari lapangan melalui penuturan lisan para informan. Proses penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yakni informan dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan kapasitas, rekam jejak, pengetahuan mendalam, serta penguasaan komprehensif informan terhadap historisitas Kesultanan Buton. Untuk menjamin kedalaman eksplorasi dan keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini memvalidasi temuan melalui tujuh orang informan kunci yang merepresentasikan berbagai otoritas keilmuan dan kelembagaan adat.

Representasi pelestari sejarah secara langsung diwakili oleh Bapak Almuhaji Mulku Zahari, seorang Sejarawan Buton yang juga mengemban amanah sebagai Juru Kunci Museum Kesultanan Buton. Dari sudut pandang akademis dan kebijakan pelestarian, penelitian ini diwakili Bapak La Ode Abdul Munafi yang berkapasitas sebagai Tim Ahli Cagar Budaya Sulawesi Tenggara sekaligus akademisi. Pemahaman historis tersebut lebih lanjut diperkaya dengan pandangan empiris dari para pengamat sejarah Buton, yaitu Bapak Jafar dan Bapak Baharuddin. Sementara itu, untuk menggali esensi nilai-nilai tradisi, tata laku, dan kearifan komunal secara otentik, penelitian ini diwakili tokoh-tokoh adat Buton yang memiliki legitimasi kultural di tengah masyarakat, yaitu Bapak Arif Tasila, Bapak Husain, dan Ibu Nusia.

C.3. Teknik Analisis Data

Proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dengan kegiatan pengumpulan data di lapangan guna menjaga kesinambungan interpretasi. Prosedur analisis kualitatif ini mengadopsi model interaktif yang terstruktur dalam tiga tahapan esensial. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu peneliti melakukan seleksi ketat dan pemusatan perhatian serta penyederhanaan terhadap data mentah yang bersumber dari catatan lapangan dan transkripsi wawancara. Pada tahap ini, kompleksitas informasi dikategorikan secara spesifik ke dalam tema nilai akuntansi dan tradisi mata

uang Kampua, sementara data yang dinilai tidak relevan akan dieliminasi untuk menajamkan fokus analisis.

Data yang telah reduksi kemudian diorganisasikan ke dalam tahap penyajian data (data display). Informasi tersebut disusun ke dalam bentuk uraian naratif deskriptif yang terintegrasi, yang memungkinkan terciptanya pemahaman yang jernih mengenai struktur serta pola hubungan antarfenomena akuntansi budaya Buton yang tengah dikaji. Tahap akhir dari siklus analisis ini adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang melibatkan proses pencarian makna mendalam, interpretasi, dan komparasi temuan empiris dengan landasan teoretis yang relevan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1. Hasil Penelitian

D.1.1. Karakteristik Informan dan Uji Keabsahan Data Lapangan

Penelitian kualitatif berparadigma Nusantara mensyaratkan kedalaman makna yang digali langsung dari subjek yang menghidupi dan melestarikan sejarah tersebut. Oleh karena itu, data primer dalam penelitian ini direpresentasikan oleh hasil wawancara mendalam dan penelusuran dokumen historis yang berfokus pada tradisi pembuatan hingga peredaran mata uang Kampua. Karakteristik data bersumber dari tujuh informan kunci yang secara sengaja (purposive) dipilih untuk merepresentasikan tiga pilar otoritas keilmuan di wilayah eks-Kesultanan Buton. Pilar pertama adalah otoritas pelestari sejarah yang direpresentasikan oleh Bapak Almuhaji Mulku Zahari, sosok yang mengemban amanah sebagai Juru Kunci Museum Kesultanan Buton. Pilar kedua mewakili otoritas akademis dan pelestari cagar budaya, yang diartikulasikan melalui pandangan analitis yakni Bapak La Ode Abdul Munafi, Bapak Jafar, dan Bapak Baharuddin. Sementara itu, pilar ketiga berfokus pada otoritas legitimasi kultural dan tata laku adat yang diwakili oleh tokoh masyarakat setempat, yakni Bapak Arif Tasila, Bapak Husain, dan Ibu Nusia.

Keterlibatan ketujuh informan ini memberikan spektrum pemahaman yang sangat kaya, mulai dari detail teknis pembuatan hingga filosofi tak kasat mata di balik sehelai kain Kampua. Untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun terhindar dari bias subjektivitas, pengujian keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode secara berlapis. Pernyataan lisan para informan disilangkan dan diverifikasi dengan bukti fisik artefak kain tenun *bhida* yang masih tersimpan (Gambar 3), serta dicocokkan dengan catatan historiografi Kesultanan Buton.

Gambar 3. Artefak Fisik Mata Uang Kain Kampua
Hasil Dokumentasi Lapangan



Sumber: *Arsip Pribadi Bapak La Ode Abdul Munafi*

Kesesuaian yang koheren antara memori kolektif informan, eksistensi artefak fisik, dan catatan literatur sejarah ini memastikan bahwa interpretasi terhadap nilai-nilai budaya yang dikonstruksi dalam penelitian ini memiliki tingkat kredibilitas (validitas internal) dan dependabilitas yang sangat tinggi. Konstruksi data yang solid ini pada akhirnya menjadi landasan yang kuat untuk membedah praktik akuntansi Kampua secara komprehensif.

D.1.2. Kampua sebagai Manifestasi Kedaulatan dan Realitas Akuntansi Buton

Mata uang kampua diciptakan sejak Raja pertama, Ratu Wa Kaa Kha sekitar tahun 1350 M. Seluruh proses pembuatan Kampua, sejak pemilihan kualitas jenis kapas, pemintalan benang, penenun sampai menjadi Kampua dilaksanakan didalam Kamali (Istana Raja) oleh para petugas Wanita yang dipilih khusus dibawah pengawasan ketat Sang Ratu. Sejak saat itulah Kampua resmi menjadi mata uang Kerajaan Buton. Berikut potongan wawancara peneliti dengan Bapak Almuhaji Mulku Zahari selaku sejarawan Buton:

> *"Buton memiliki undang-undang dan memiliki mata uang tersendiri. Mata uang tertua di dunia dari tahun 1300-an kita sudah memiliki mata uang, ada beberapa bentuk mata uang."*

Hal ini juga diperkuat dalam wawancara dengan Bapak La Ode Abdul Munafi sebagai berikut.

> *"…dalam konteks perdagangan rempah saat itu karena Buton termasuk jalur pelayanan rempah jadi uang Kampua ikut tersebar karena sebagai alat tukar bagi perniagaan. Itulah salah satu peninggalan Ratu Wa Kaa Kaa (Raja Buton ke-1), dan pada masa pemerintahhan Ratu Bulawambona (Raja Buton ke-2) alat tukar itu berlaku."*

Pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-4, La Elangi Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615 M), mata uang Kampua berlaku bersama-sama dengan mata uang Belanda (Gulden). Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian antara Sultan Dayanu Ikhsanuddin dengan Komandeur Appolonius Schet pada tanggal 5 Januari 1613 M, dengan nilai 10 sen uang Belanda sama dengan dengan 40 helai Kampua, sebagaimana ditambahakn Bapak Almuhaji Mulku Zahari dalam potongan wawancara berikut ini:

> *"Mata uang Kampua berlaku bersama-sama dengan mata uang Belanda. Itu ditandai dengan adanya perjanjian antara Sultan Dayanu Ikhsanuddin dengan Komandeur Appolonius Schet pada tanggal 5 Januari 1613. Perjanjian itu adalah perjanjian pertama yang disebut dengan Janji Bhaana. Nilai 10 sen uang Belanda sama dengan 40 helai Kampua."*

Adanya kesepakatan internasional dalam perjanjian dagang tersebut secara rigid menetapkan bahwa nilai 10 sen uang Belanda (Gulden) setara dengan 40 helai Kampua. Melalui mata uang Kampua, menandakan Buton berdaulat. Selain itu, mata uang kampua diproduksi sendiri oleh Kerajaan Buton yang bahannya diambil langsung dari serat tumbuhan dan selanjutnya ditenun sesuai dengan motif dan ukuran yang berlaku pada masanya. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak La Ode Abdul Munafi, yaitu:

> *"Uang kampua itu merupakan salah satu keunggulan sebagai negara yang berdaulat ditentukan oleh kepemilikan mata uang, mata uang ini di produksi sendiiri oleh Buton yang bahannya diambil dari serat tumbuhan kemudian di tenun dan ada motif tertentu, ukuran dan motif untuk mencegah adanya pemalsuan."*

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mata uang Kampua bukan sekadar alat tukar komoditas, melainkan simbol kedaulatan sebuah negara yang beradab. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak La Ode Abdul Munafi, eksistensi mata uang merupakan parameter utama bagi sebuah bangsa untuk diakui kedaulatannya secara internasional. Kampua merepresentasikan kemandirian ekonomi Kesultanan Buton yang mampu memproduksi alat tukarnya sendiri dari serat tumbuhan lokal melalui proses tenun. Secara teoretis, hal ini membuktikan bahwa akuntansi dalam perspektif masyarakat Buton telah melampaui teknis

pencatatan, menjadi sebuah fenomena sosial yang mana identitas bangsa dilekatkan pada instrumen moneternya.

Luasnya peredaran mata uang Kampua sampai di luar Buton menjadikan Buton sebagai negara Khalifatul Khamis yang mendapat pengakuan dari Kesultanan Turky, sehingga mata uang Kampua terdaftar dan memiliki legalitas pada bank dunia, bahwa mata uang Kesultanan Buton adalah Kampua dan bersifat resmi. Sebagaiamana diuangkapkan dalam wawancara dengan Bapak Jafar sebagai berikut:

> *"Pada saat Kesultanan Sultan Dayanu Ikhsanuddin, Buton mendapat gelar khalifatul Khamis, yang maknanya tinggi. Salah satu syarat pengakuan Kesultanan Turki waktu itu untuk kekhalifaan di dunia ini ada dua yaitu khalifah Badziah dan Utsmani, Utsmani itu yang di Turky yang memberikan gelar khalifatul khamis pada kesultanan, karena kriteria negeri yang diakui negara lain waktu itu sudah memenuhi syarat antara lain Buton sudah memiliki mata uang sendiri karena banyak negara-negara waktu itu Kesultanan yang berdiri atau belum Kesultanan, belum memiliki mata uang resmi secara internasional dan belum diakui tetapi kampua waktu itu langsung mendapat pengakuan."*

Peredaran Kampua yang meluas menunjukkan adanya pengakuan luas terhadap sistem nilai ekonomi Buton. Posisi Buton sebagai jalur pelayaran rempah membuat Kampua memiliki legalitas yang kuat di mata pedagang internasional. Sistem moneter Kampua telah memenuhi standar global pada zamannya, dengan dasar pecahan Kampua yang digunakan adalah *bhoka, suku, sen,* dan *uwa*. Saat ini, nilai tukar *bhoka* yang berlaku dalam masyarakat Buton adalah 1 bhoka setara dengan Rp. 60.000. Dalam wawancara dengan Bapak Husain menjelaskan mengenai kurs *bhoka* sebagai standar mata uang kampua yang berlaku saat ini sebagai berikut:

> "*…untuk 1 bhoka senilai Rp. 60.000, 1 suku senilai Rp. 15.000, 1 see atau sen senilai Rp. 5.000 dan 1 uwa senilai Rp 2.500. Sedangkan 1 boka senilai 12 sen, 1 suku senilai 3 sen*".

D.1.3. Tradisi Pembuatan Kampua sebagai Mekanisme Pengendalian Internal Berbasis Kultural

Selaras dengan tujuan penelitian untuk mengonstruksi nilai budaya Nusantara, hasil eksplorasi lapangan membuktikan bahwa tradisi pembuatan Kampua di Kesultanan Buton pada hakikatnya adalah wujud nyata dari sistem pengendalian internal (*internal control*) yang sangat canggih dan melampaui zamannya. Dalam kacamata akuntansi konvensional, pengendalian internal sering kali direduksi menjadi serangkaian prosedur tertulis dan hierarki otorisasi birokratis. Namun, dalam konteks masyarakat Buton masa lampau, mekanisme perlindungan terhadap integritas aset dan sistem keuangan ini dieksekusi melalui tata laku kultural yang sangat ketat. Berdasarkan penuturan Bapak Baharuddin, proses pembuatan instrumen moneter ini tidak dilakukan secara massal dan sembarangan di ranah publik. Produksi Kampua sepenuhnya dipusatkan di dalam Kamali atau kompleks Istana kesultanan. Sentralisasi ruang produksi ini dapat dimaknai setara dengan otoritas bank sentral di era modern, yang memegang hak prerogatif absolut dalam mencetak uang kartal. Berikut potongan wawancara peneliti dengan Bapak Baharuddin:

> *"Kampua di tenun berdasarkan penuh pengawasan seperti pabrik uang yang sama hal nya dengan Indonesia memiliki pengawasan ketat, di Buton juga memiliki pengawasan yang ketat artinya jika memang istilahnya Kampua itu dijadikan sebagai mata uang yang berlaku khususnya kalangan di Kesultanan Buton, kain Kampua memiliki corak tertentu dan juga memiliki nilai*

tertentu, produksinya juga diawasi dan memiliki sistem pembuatan khusus yang diawasi oleh pihak istana."

Mekanisme pengendalian preventif ini diawasi secara eksklusif oleh Bhonto Ogena atau Menteri Besar kesultanan. Pengawasan langsung oleh pejabat tinggi ini secara terstruktur didesain untuk mencegah terjadinya hiperinflasi akibat kelebihan pasokan uang yang beredar di masyarakat, sekaligus menutup rapat celah pemalsuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, kecerdasan sistem akuntansi Buton terlihat pada mekanisme standarisasi fisik Kampua. Sebagaimana diuraikan oleh Bapak Arif Tasila, ukuran standar setiap lembar Kampua tidak menggunakan alat ukur metrik yang statis, melainkan didasarkan pada dimensi jengkal tangan Bhonto Ogena yang tengah menjabat. Penjelasan ini ditegaskan melalui penuturan beliau dalam potongan wawancara berikut ini:

"Ukurannya Kampua didasarkan atas jengkal Bonto Ogena, jadi ketika sudah berganti Bonto Ogena maka berganti juga bendanya karena disesuaikan."

Argumen ini diperkuat oleh Bapak La Ode Abdul Munafi sebagai berikut:

"Uang kampua itu merupakan salah satu keunggulan sebagai negara yang berdaulat ditentukan oleh kepemilikan mata uang, mata uang ini di produksi sendiiri oleh Buton yang bahannya diambil dari serat tumbuhan kemudian di tenun dan ada motif tertentu, ukuran dan motif untuk mencegah ada nya pemalsuan. Ukurannya kampua didasarkan atas jengkal Bonto Ogena jadi ketika sudah berganti Bonto Ogena maka berganti pula bendanya karena disesuaikan."

Standardisasi ukuran Kampua yang didasarkan pada jengkal tangan Bhonto Ogena yang sedang menjabat mencerminkan bentuk verifikasi fisik yang dinamis. Berdasarkan komparasi data historis, standardisasi ini diwujudkan secara presisi melalui spesifikasi fisik kain, yaitu memiliki lebar 140 mm dan panjang 170 mm. Kombinasi corak motif petak yang rumit menjadi pengendalian internal masa lampau yang sangat maju. Hal ini ditambahkan dalam wawancara dengan Bapak Husain sebagai berikut:

"Mata uang ini di produksi sendiri oleh buton yang bahannya diambil dari serat tumbuhan kemudian di tenun dan ada motif tertentu, ukuran dan motif untuk mencegah adanya pemalsuan"

Keputusan untuk menggunakan jengkal tangan pejabat ini menghadirkan bentuk verifikasi fisik yang dinamis sekaligus unik. Setiap pergantian struktur kepemimpinan atau pergantian Bhonto Ogena akan secara otomatis diikuti dengan penyesuaian ukuran, corak, dan motif instrumen mata uang tersebut. Melalui pendekatan ini, kerajaan menciptakan tata kelola yang transparan sekaligus akuntabel karena setiap helai kain Kampua yang dipegang oleh rakyat memiliki rekam jejak otorisasi yang jelas dan tak terbantahkan dari entitas penguasa tertinggi pada masa itu.

D.1.4. Konstruksi Nilai-Nilai Nusantara dalam Praktik Akuntansi Kampua

Eksplorasi yang lebih mendalam terhadap hulu dan hilir ekosistem Kampua berhasil menyingkap bahwa tradisi pembuatan mata uang ini secara inheren mengonstruksi dan mengejawantahkan empat nilai budaya luhur Nusantara dalam kehidupan masyarakat Buton. Nilai yang pertama dan paling fundamental adalah nilai kejujuran. Nilai ini menjadi prasyarat mutlak yang diwajibkan bagi para penenun khusus yang ditunjuk oleh institusi kerajaan. Ibu Nusia menekankan bahwa tidak sembarang orang diizinkan menenun *bhida* untuk Kampua sebagai berikut:

"…hanya orang-orang tertentu saja yang masuk disitu. Menurut saya dari redaksi yang banyak beredar juga seperti itu, tidak masuk akal kalau kita memproduksi sesuatu ada rahasia yang di tau orang. Contohnya ada uang yang layak dan tidak layak digunakan, sampai sekarang pendeteksi uang di bank jika kita menarik yah lancar lancar saja tetapi kita menyetor kadang uang kita stor kadang ditolak oleh mesin ATM-nya padahal uang itu uang asli apalgi barang sederhana seperti Kampua, jadi masih menggunakan sistem manual."

Penenun Kampua adalah orang-orang terpilih yang diwajibkan memiliki integritas tanpa cela dalam mereplikasi corak yang telah dititahkan. Kesesuaian corak, kerapatan benang, dan presisi ukuran inilah yang menjadi penentu nilai intrinsik maupun nominal mata uang tersebut. Dalam tatanan adat Buton, ketidakjujuran atau deviasi yang disengaja dalam proses bertenun bukan sekadar dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih atau pemicu instabilitas ekonomi, melainkan dikonstruksikan sebagai bentuk pengkhianatan fatal terhadap amanah kesultanan yang membawa sanksi sosial yang berat.

Nilai yang kedua adalah nilai kepercayaan dan tanggung jawab, yang menjembatani hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Masyarakat Buton, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Husain, mengonseptualisasikan titah Sultan dalam tata kelola perekonomian sebagai perpanjangan dari mandat ilahiah. Para penenun dan pengawas produksi memikul beban moral yang sangat berat untuk menjaga kerahasiaan teknik pembuatan demi tegaknya kedaulatan negara. Kepercayaan komunal yang terjalin erat ini pada akhirnya bertransformasi menjadi modal sosial yang sangat efektif untuk meminimalisasi biaya keagenan (agency cost). Berikut potongan wawancara peneliti dengan Bapak Husain:

"Loyalitas dengan Kesultanan sangat luar biasa karena orang dulu memiliki keyakinan bahwa kita melanggar perintah adapula ilmu kebatinan. Segala hal yang berkaitan dengan tata kehidupan bermasyarakat melanggar adat hukumannya besar. Hal itu merupakan keyakinan sampai saat ini yang masih mempertahankan adat tradisi seperti itu."

Kepatuhan para pelaku ekonomi dalam memproduksi dan menggunakan Kampua tidak didorong oleh ketakutan paranoid terhadap sanksi formal hukum positif, melainkan digerakkan oleh kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan bernegara.

Nilai ketiga tercermin pada nilai gotong royong yang berlandaskan falsafah lokal Buton yakni *binci-binciki kuli.* Falsafah yang bermakna saling merasakan penderitaan dan kebahagiaan sesama manusia ini menjadi jiwa yang menghidupkan setiap transaksi pertukaran Kampua di pasar tradisional. Melalui nilai ini, praktik akuntansi dikonstruksi agar tidak mengarah pada akumulasi kapitalis yang eksploitatif, melainkan diorientasikan untuk mewujudkan keadilan distributif. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nusia dalam wawancara berikut ini:

"Weti dan pasali itu dulu kumpulnya pakai Kampua, tapi tidak masuk kantong Sultan sendiri. Uangnya diputar lagi buat masyarakat, perbaiki fasilitas, atau kalau ada perang..."

Nilai *binci-binciki kuli* ini tervisualisasi secara nyata dalam mekanisme sistem perpajakan kerajaan (weti). Penarikan pajak yang menggunakan medium Kampua tidak bertujuan untuk memperkaya kaum feodal, melainkan dihimpun untuk kemudian didistribusikan kembali secara proporsional demi kemakmuran rakyat, pemeliharaan sarana publik, dan penyediaan armada pertahanan Kesultanan Buton.

Nilai keempat yang menjadi payung bagi keseluruhan sistem adalah nilai spiritualitas. Secara esensial, pengerjaan hingga peredaran Kampua adalah pengejawantahan dari pengabdian total manusia kepada pemimpinnya, yang bermuara pada manifestasi ketaatan kepada Sang Pencipta. Penjelasan ini ditegaskan melalui penuturan Bapak Husain dalam wawancara berikut ini:

> *"Segala urusan di Buton, termasuk Kampua ini, pada akhirnya kembali kepada niat pengabdian. Sultan itu kan pemimpin yang kita tuakan. Jadi, patuh pada ukuran Kampua, menenun dengan ikhlas, dan berdagang tidak saling merugikan itu bukan cuma soal aturan ekonomi saja, tapi wujud bakti dan ibadah kita kepada Sang Pencipta. Kalau sistem ini dirusak, sama saja kita merusak amanah agama."*

Berbagai penuturan informan secara konsisten mengonfirmasi bahwa loyalitas terhadap sistem moneter kerajaan didasari oleh keyakinan sosioreligius masyarakat. Masyarakat Buton meyakini bahwa seluruh aktivitas duniawi, termasuk di dalamnya adalah praktik akuntansi, perdagangan, perumusan standar harga, dan penciptaan alat tukar, tidak boleh dilepaskan dari tali ikatan ketuhanan. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Bapak Jafar mengenai legitimasi gelar Khalifatul Khamis dari Kesultanan Turki Usmani, yang memberikan landasan teologis bahwa tata kelola kerajaan, termasuk sistem akuntansinya, harus senantiasa berada dalam koridor hukum agama dan moral.

D.1.5. Fungsi Instrumen Akuntansi dalam Tatanan Sosial Kemasyarakatan

Salah satu temuan dari eksplorasi ini adalah fungsi Kampua melewati batas-batas ekonomi teknis dan mekanis, meluas ke dalam tatanan akuntansi sosial budaya masyarakat Buton. Instrumen yang wujud fisiknya hanyalah sehelai kain tenun ini bertransformasi menjadi standar perhitungan logis dalam menentukan hierarki dan keseimbangan sosial. Secara empiris dapat dilihat dari penggunaan satuan *bhoka*, satuan hitung yang secara hierarkis setara dengan sekian lembar Kampua, sebagai patokan mutlak dalam pranata upacara adat dan perkawinan. Kampua berperan dalam penetapan besaran mahar perkawinan (*popolo*) tersebut.

Penetapan mahar ini bukanlah proses yang serampangan, melainkan sebuah proses akuntansi budaya yang terstratifikasi dengan sangat rapi berdasarkan kelas sosial, mulai dari golongan *kaumu* (kaum kerabat sultan), golongan *walaka* (kaum pelaksana pemerintahan dan adat), hingga golongan *papara* (masyarakat umum). Sistem klasifikasi ini merefleksikan fungsi akuntansi Kampua sebagai instrumen pengakuan strata sosial dan pemeliharaan keseimbangan adat. Selain itu, perhitungan *popolo* ini dirinci secara mendetail ke dalam berbagai subdivisi teknis, seperti pembagian untuk *kalamboko* (pemberian inti) dan *kapopabilangi* (pemberian penyerta), yang menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara telah menguasai logika sistematis, matematis, dan akuntansi domestik yang amat kompleks sejak dahulu.

Selain digunakan dalam ruang lingkup domestik perkawinan, akuntansi tradisional Kampua juga dilembagakan melalui mekanisme distribusi upeti atau uang penghormatan yang disebut *pasali*. Bapak Almuhaji Mulku Zahari memaparkan bahwa struktur distribusi *pasali* dirancang dengan pedoman yang sangat presisi berdasarkan hierarki jabatan dalam tatanan pemerintahan sebagai berikut:

> "*Pasali itu bukan pembagian uang yang sembarangan, tapi sudah ada aturan dan pedoman yang sangat jelas dari kesultanan. Dihitung sesuai kedudukan dalam pemerintahan adat, mulai untuk sultan, menteri-menteri, anggota sara, sampai mengalir ke bawah hingga para petugas atau aparat yang mengurus masjid kesultanan. Semua ada hitungan dan takarannya yang pasti.*"

Alokasi distribusi *pasali* disusun mulai dari tingkatan sultan, jajaran menteri dan anggota sara (lembaga musyawarah adat), hingga diturunkan kepada para aparat pelaksana di masjid kesultanan. Transparansi dan presisi dalam pembagian pasali ini mendemonstrasikan bahwa Kesultanan Buton masa lampau telah memiliki sistem klasifikasi dan mekanisme pelaporan distribusi nilai dalam struktur sosial masyarakatnya.

D.2. Pembahasan

D.2.1. Memaknai Akuntansi dalam Perspektif yang Lebih Luas

Berdasarkan serangkaian hasil analisis empiris di atas, interpretasi teoretis menggunakan lensa Paradigma Nusantara berhasil meredefinisi dan memberikan pemaknaan yang bernilai terhadap disiplin ilmu akuntansi. Jika selama ini akuntansi modern yang berakar pada pemikiran kapitalisme Barat telah terjebak pada perspektif sempit sebagai sekadar instrumen pencatatan transaksi demi memenuhi nafsu laba entitas bisnis semata, maka tradisi panjang Kampua membuktikan konklusi yang sebaliknya. Melalui pembacaan yang komprehensif terhadap tradisi pembuatan dan peredaran Kampua, akuntansi dapat dimaknai dalam perspektif yang jauh lebih luas dan mulia, yakni sebagai sebuah realitas sosial, produk peradaban, dan entitas budaya yang hidup serta bernapas di dalam interaksi antarindividu yang berlandaskan moral.

Temuan utama dari kajian ini secara tegas menolak premis bahwa akuntansi adalah ilmu yang bebas nilai (*value-free*). Ketangguhan tata kelola keuangan Kesultanan Buton yang mampu menjaga kedaulatan dan stabilitas ekonominya hanya dengan sehelai kain tenun di tengah gempuran peradaban global yang saat itu mendewakan logam mulia dan emas sebagai standar nilai intrinsik, sejatinya bersumber dari kekuatan konstruksi nilai budaya Nusantara itu sendiri. Integrasi yang paripurna antara nilai kejujuran yang ditanamkan pada jari-jemari para penenun, tanggung jawab komunal, semangat *binci-binciki kuli* (gotong royong), dan religiositas yang tertanam sejak proses hulu di dalam Kamali hingga distribusinya di pasar, menjadi kunci utama yang mencegah sistem moneter Kampua hancur oleh inflasi maupun krisis kepercayaan (distrust).

Lebih dari itu, eksplorasi ini juga menyingkap fenomena daya tahan atau resiliensi akuntansi budaya Nusantara yang luar biasa. Meskipun secara *de facto* dan *de jure* eksistensi fisik Kampua sebagai alat tukar telah digantikan oleh mata uang Rupiah sejak integrasi Kesultanan Buton ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (terutama memasuki tahun 1960-an), namun ruh akuntansi yang menyertainya menolak untuk mati. Logika perhitungan Bhoka tetap lestari dan digunakan secara aktif dan simbolis dalam pranata upacara adat masyarakat Buton di era modern. Sebagai bukti empiris, tercatat bahwa saat ini nilai satu Bhoka dalam transaksi adat diekuivalensikan dengan nominal Rp60.000, sebuah angka konversi yang bersifat adaptif mengikuti dinamika makroekonomi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa akuntansi sejatinya adalah produk kebudayaan. Memaknai akuntansi melalui perspektif warisan tradisi lokal Buton memberikan sebuah tamparan sekaligus pelajaran krusial bagi pengembangan ilmu tata kelola keuangan di masa kini. Kajian ini memberikan penguatan bahwa secanggih apa pun tatanan angka, prosedur sistem informasi, dan teknis pengukuran matematis dirancang, sistem tersebut tidak akan pernah mampu menciptakan mekanisme pertanggungjawaban ekonomi yang berkelanjutan (sustainable) dan berkeadilan, apabila dengan sengaja dipisahkan dari fondasi nilai moral, etika, dan spiritualitas manusia yang menjalankannya. Sebagaimana ditegaskan Bapak Husain bahwa ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap tatanan adat ini bukanlah didasari oleh ketakutan semata, melainkan merupakan wujud manifestasi tanggung jawab moral dan spiritual yang mendalam. Oleh karena itu, melalui konstruksi praktik

akuntansi mata uang Kampua, penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal Nusantara memiliki referensi sejarah yang sangat mumpuni untuk menawarkan solusi atas krisis etika dalam praktik tata kelola modern masa kini. Nilai-nilai kejujuran, amanah, gotong royong (*binci-binciki kuli*), dan keyakinan spiritual yang terkandung dalam sehelai kain Kampua bukanlah sekadar romantisme peradaban masa lalu, melainkan sebuah kerangka konseptual yang ideal bagi pembangunan sistem tata kelola keuangan yang humanis, transparan, dan berkeadilan.

E. PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini bahwa tradisi pembuatan dan peredaran mata uang Kampua pada masa Kesultanan Buton bukan sekadar instrumen pertukaran ekonomi yang bersifat teknis dan mekanis, melainkan sebuah realitas sosial akuntansi yang dikonstruksi erat oleh nilai-nilai luhur budaya Nusantara. Melalui sentralisasi produksi di dalam Kamali dan standardisasi fisik yang dinamis menggunakan ukuran jengkal tangan Bhonto Ogena, masyarakat Buton masa lampau telah mempraktikkan mekanisme pengendalian internal (internal control) yang sangat canggih untuk meminimalisasi risiko pemalsuan dan inflasi. Eksistensi Kampua dijiwai secara integral oleh empat nilai fundamental, yakni nilai kejujuran para penenun khusus, kepercayaan dan tanggung jawab komunal kepada pemimpin, semangat gotong royong (binci-binciki kuli), serta ketaatan spiritual sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Temuan ini secara tegas meredefinisi pandangan positivistik dengan membuktikan bahwa akuntansi sejatinya adalah produk kebudayaan, yakni tatanan nilai moral dan spiritual menjadi fondasi utamanya.

Secara praktis, implikasi dari temuan ini diharapkan mampu memberikan wacana kritis bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem tata kelola, regulasi transaksi, dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang berlandaskan pada kearifan lokal. Kajian ini menegaskan bahwa sistem prosedural secanggih apa pun tidak akan mewujudkan tata kelola ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan apabila dipisahkan dari etika dan spiritualitas manusia yang menjalankannya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta pemerintah daerah untuk terus melestarikan warisan tradisi Kesultanan Buton sebagai bukti kedaulatan identitas bangsa.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang berfokus secara spesifik pada historisitas instrumen mata uang Kampua di wilayah eks-Kesultanan Buton, sehingga karakteristik lokalitas budayanya masih dominan. Hal ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan akuntansi multiparadigma dengan mengeksplorasi bagaimana keilmuan akuntansi dapat diwujudkan melalui praktik tata kelola moneter tradisional pada kebudayaan Nusantara lainnya. Selain itu, saran penelitian selanjutnya tidak hanya berhenti pada penelusuran historis konversi nilai hierarkis adat seperti satuan ukur *bhoka*, melainkan mengintegrasikan secara teoretis ke dalam konsep akuntansi modern, yang mampu mendefinisikan konsep akuntabilitas (*accountability*), pengakuan (*recognition*), dan pengukuran (*measurement*) nilai sosial-spiritual yang selama ini terabaikan dalam kerangka akuntansi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. A. (2022). Dari Mata Uang Kolonial ke Mata Oeang. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, *5*(1), 24–34. Http://Jurnal.Unsil.Ac.Id/Index.Php/Bihari

Alifuddin, M., & Widodo, W. (2022). How Is Cultural Intelligence Related To

Human Behavior? *Journal Of Intelligence*, *10*(1), 1–18. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.3390/Jintelligence10010003

Aneswari, Y., Dan Musmini, L. (2017). Quo Vadis1 Pancasila Dalam Pendidikan Akuntansi Di Indonesia? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *8*(59), 149–165. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.18202/Jamal.2017.04.7045

Asiam, S. (2024). Akuntansi Dalam Perspektif Budaya Melayu: Sebuah Studi Etnografi Pada Masyarakat Bengkalis. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *3*(4), 2118–2129.

Endiaverni, Wa Ode; Triyuwono, Iwan; Purwanti, L. (2023). *Formulasi Prinsip Dasar Etika Akuntan Berdasarkan Bhinci-Bhinciki Kuli*. Http://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/215164

Endiaverni, W. O., Triyuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2024). *Pobhinci-Bhinciki Kuli : An Accounting Research Methodology Based On The Cultural Philosophy Of The Butonese People*. *14*(1), 1–10. Https://Doi.Org/10.14414/Tiar.V14i1.3747

Harari, Y. N. (2021). *Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia* (Cetakan Pe). Kepustakaan Populer Gramedia.

Housel, M. (2022). *The Psychology Of Money*. Penerbit Baca.

Kamayanti, A. (2016). Fobi (A) Kuntansi : Puisisasi Dan Refleksi Hakikat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *7*(1), 1–155. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.18202/Jamal.2016.04.7001

Karyada, I. P. F. (2024). Paradigma Nusantara Dalam Masa Depan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *15*(1), 190–204. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.21776/ Ub.Jamal.2024.15.1.14

Lestari, Etty Puji Dan Sugiyanto, F. X. (2017). *Peranan Uang Dalam Perekonomian* (Modul 1 Ma). Universitas Terbuka.

Lestari, D. (2017, October 8). Kampua, Mata Uang Pertama Kerajaan Buton Terbuat Dari Tenun. *Viva.Co.Id*. Https://Www.Viva.Co.Id/Gaya-Hidup/Inspirasi-Unik/964387-Kampua-Mata-Uang-Pertama-Kerajaan-Buton-Terbuat-Dari-Tenun

Mulawarman, A. D. (2021). *Paradigma Nusantara : Decolonizing Science Agenda*. *3*(2), 99–122.

Munafi, L. O. A. (2022). *Buton Dalam Lintasan Sejarah, Warisan Budaya, Dan Perubahan Sosial*. Universitas Halu Oleo Press.

Pradiningtyas, T. E., & Lukiastuti, F. (2019). Pengaruh Pengetahuan Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Locus Of Control Dan Perilaku Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Minds: Manajemenide Dan Inspirasi*, *6*(1), 96–112. Https://Doi.Org/Http://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Minds/%E2%80%9dhttp:/Dx.Doi.Org/10.24252/Minds.V6i1.9274%E2%80%9d

Rachmadani, Febby; Wiliana, Rahayu; Pagalung, G., & Damayanti, R. . (2024). Praktik Akuntansi Dalam Penetapan Nilai Mahar (Boka) Pada Pernikahan Adat Buton Di Kota Baubau. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, *7*(1), 37–51. Https://Ojs.Ejournalunigoro.Com/Index.Php/Jemes

Riduwan, A. (2007). Teori Akuntansi: Dari Normatif Ke Positif, Isu Bebas Nilai, Hingga Mitos Dan Wacana Redefinisi Akuntansi. *Jurnal Tera Ilmu Akuntansi*, *8*(1), 16–36.

Rosdin, A. (2015). *Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat Buton*. Oceania Press.

Safitri, A., Apriyani, P. R., Fuwi, S., Insan, U., Indonesia, P., Terbuka, U., Kekayaan, M., & Diri, P. (2024). The Psychology Of Money : Pelajaran Abadi Mengenai Kekayaan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *02*(01), 73–78.

Sari, E. N. (2018). Budaya Organisasi Dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntasi Keuangan Daerah (Studipada Pemerintahan Kabupaten Dan Kota Se- Provinsi Sumatera Utara. In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Dan Aisyiah Tantangan Pascasarjana Di Era Revolusi Industri 4 . 0* (P. 243). Program Pascasarjana Umy.

Smith, A. (2017). *The Theory Of Moral Sentiments* (All Rights). Copyright © Jonathan Bennett 2017.

Susantio, D. (2010, October 5). Uang Kampua, Sistem Pembayaran Dari Buton. *Kompas.Com*. Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2010/10/05/14541150/Uang-Kampua-Sistem-Pembayaran-Dari-Buton

Zahari, A, M. 1980. *Darul Butuni Sejarah dan Adatnya (Buton Jilid 1I*). Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan DEPDIKBUD. 1977. Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton Jilid I, II, III). Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan DEPDIKBUD.